

SPIRITUALITAS KEPEMIMPINAN SEBAGAI PELAYANAN: MENUJU TERWUJUDNYA BONUM COMMUNE

Oleh :

Sebastianus Aldo¹⁾, Bonifasius²⁾, Georgius Redwan³⁾, Maria Magdalena Husun⁴⁾, Yly Suardy⁵⁾, Roida Sihombing⁶⁾, Novelia Makalew⁷⁾, Laurentius Prasetyo⁸⁾

^{1,2,3,4,5,6,7,8} STAKat Negeri Pontianak

¹email: aldosebastianus29@gmail.com

²email: bonbontop368@gmail.com

³email: georgiusredwan@gmail.com

⁴email: mariamagdalengahusun15@gmail.com

⁵email: ylysuardy@gmail.com

⁶email: roidasihombing7@gmail.com

⁷email: nmakalew@gmail.com

Informasi Artikel

Riwayat Artikel :

Submit, 25 Agustus 2025

Revisi, 7 September 2025

Diterima, 14 September 2025

Publish, 15 September 2025

Kata Kunci :

Spiritualitas Kepemimpinan,
Bonum Commune,
Servant-Leadership,
Pelayanan.



ABSTRAK

Artikel ini mengeksplorasi spiritualitas kepemimpinan sebagai pelayanan, sebuah paradigma yang melampaui dominasi pribadi dan ambisi kelompok demi *bonum commune*. Penelitian ini didukung oleh kerangka teoretis St. Thomas Aquinas, khususnya relasi antara bagian (*pars*) dan keseluruhan (*totus*) dalam keadilan (*iustitia*), serta nilai-nilai ajaran sosial Gereja modern. Metodologi yang digunakan adalah studi kepustakaan, yang dikombinasikan dengan analisis kasus nyata dari Profesional Usahawan Katolik (PUKAT) Nasional. Hasil utama menunjukkan bahwa spiritualitas pelayanan terbukti direfleksikan melalui gaya servant-leadership, praktik keheningan reflektif (*nang-ning-nung*), dan kolaborasi inklusif dalam profesi. Praktik-praktik ini tidak hanya membumikan nilai iman, tetapi juga memperkuat solidaritas, keadilan, dan martabat di kalangan komunitas profesional. Kesimpulannya, spiritualitas kepemimpinan sebagai pelayanan bukan sekadar ideal akademis, melainkan kebutuhan mendesak untuk membentuk masyarakat yang inklusif, adil, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama (*bonum commune*).

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



Corresponding Author:

Nama: Sebastianus Aldo

Afiliasi: STAKat Negeri Pontianak

Email: aldosebastianus29@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Dinamika kehidupan sosial dan gerejawi masa kini, tampak banyak pemimpin yang lebih mementingkan kepentingan pribadi atau kelompok yang dalam terminologi teologis disebut *bonum privatum* (kepentingan individu) daripada *bonum commune* (kebaikan bersama) (Muti & Senda, 2021). Fenomena ini mencerminkan adanya pergeseran orientasi kepemimpinan: dari semangat pelayanan menuju dominasi atau kepentingan terbatas. Dalam pandangan St. Thomas Aquinas, seorang pemimpin sejati adalah mereka yang menempatkan *bonum commune* sebagai tujuan utama pemerintahannya. Sebaliknya, bila yang dikejar hanyalah *bonum*

privatum, tata pemerintahan akan menjadi tidak adil, bahkan menyimpang (Arum, 2019).

Bonum commune bukanlah kumpulan dari banyak *bonum privatum* yang dikumpulkan menjadi suatu kesatuan (B. I. Paulus, 2012). Artinya, *bonum commune* bukanlah suatu kebaikan yang dituju demi tercapainya agenda-agenda pribadi suatu kelompok atau perorangan. *Bonum commune* disepakati, dibicarakan dan dibangun bersama dari keterlibatan aktif seluruh anggota komunitas. Oleh karena itu, untuk mewujudkan *bonum commune*, kepentingan dan tujuan pribadi haruslah ditinggalkan. Dengan demikian dapat tercipta suatu solidaritas bersama untuk mengusahakan kebaikan yang dapat dirasakan secara bersama. Di

sanalah seorang pemimpin dapat secara maksimal menunjukkan sisi pelayanannya.

Sejalan dengan gagasan tersebut, penting untuk menyoroti bahwa spiritualitas kepemimpinan tidak bisa terlepas dari konteks komunal dan dialog antarwarga komunitas. Ketika pemimpin mengedepankan *bonum commune*, hal itu menuntut cara pengambilan keputusan yang inklusif, memperhatikan suara dan kebutuhan tiap individu dalam komunitas, bukan sekadar penegakan wewenang atau ambisi pribadi (Ortiz Gomez et al., 2020). Dengan demikian, kepemimpinan menjadi tempat di mana aspirasi bersama dirumuskan secara deliberatif dan dilayani melalui komitmen spiritual, bukan instruksi *top-down*, sehingga menciptakan ruang bersama di mana setiap tindakan moral dan etis lahir dari kebutuhan akan keadilan, keterlibatan, dan solidaritas.

Penekanan kembali terhadap dimensi spiritual dalam kepemimpinan, menghadirkan kepemimpinan sebagai bentuk pelayanan bukan dominasi menjadi semakin mendesak (Benawa, 2014). Spiritualitas dalam kepemimpinan tidak hanya menumbuhkan karakter etis dan keadilan, namun juga membuat proses kepemimpinan menjadi inklusif dan berorientasi pada *bonum commune* (Donggo & Anggal, 2019). Dengan kata lain, seorang pemimpin rohani tidak berkuasa atas, melainkan bersama umat yang dipimpinnya. Hal ini menunjukkan bahwa kepemimpinan sebagai pelayanan tidak hanya memperkuat integritas moral seorang pemimpin, melainkan semakin memperkokoh solidaritas dalam komunitas.

Penulisan artikel ini bertujuan untuk menjelaskan lebih lanjut konsep spiritualitas kepemimpinan sebagai bentuk pelayanan yang menuntun pemimpin menuju aspirasi *bonum commune* secara aktual. Analisis ini berkaitan erat dengan pemikiran St. Thomas Aquinas, secara khusus mengenai hubungan bagian (*pars*) dengan keseluruhan (*totus*) dalam kerangka keadilan (*iustitia*) (Arum, 2019). Hubungan ini mengisyaratkan bahwa setiap individu (bagian) dalam komunitas bukanlah entitas mandiri, melainkan terhubung secara moral dan fungsional dengan kesejahteraan seluruh komunitas (keseluruhan).

Perbuatan adil pada level personal langsung berdampak pada integritas komunitas secara menyeluruh. Secara lebih dalam, analisis ini kemudian dikaitkan dengan nilai-nilai pokok ajaran Gereja, sehingga mampu memperoleh landasan teoretis dan etis yang kokoh (Arum, 2019). Artikel ini bertujuan mengeksplorasi bagaimana konsep spiritualitas kepemimpinan sebagai pelayanan dapat diterapkan dalam praktik nyata, baik dalam konteks gereja maupun organisasi. Fokus utama tulisan ini adalah melihat bagaimana transformasi pemimpin dengan mengutamakan pelayanan dapat berdampak pada perkembangan kesejahteraan masyarakat yang lebih inklusif dan harmonis.

Pertanyaan penelitian yang ingin dijawab yaitu, Bagaimana spiritualitas kepemimpinan sebagai

pelayanan, berdasarkan pemikiran St. Thomas Aquinas dan dokumen Gereja, dapat dihayati secara konkret dalam praktik organisasi Katolik untuk mewujudkan *bonum commune* di tengah tantangan kontemporer?. Melalui kajian teoretis dan refleksi praktis, artikel ini hendak mempertegas bahwa kepemimpinan yang didorong nilai spiritual bukan sekadar idealisme melainkan suatu kebutuhan mendesak untuk sampai pada perwujudan keadilan sejati dan kesejahteraan bersama. Semoga pemaparan dalam tulisan ini mampu membuka sudut pandang bagi pemahaman dan penerapan secara nyata dalam menempa pemimpin yang didasari oleh pelayanan, bukan penguasaan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang berbasis studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam bagaimana spiritualitas kepemimpinan sebagai suatu bentuk pelayanan, berdasarkan pandangan St. Thomas Aquinas dan dokumen Gereja dapat diaktualisasikan dalam kerangka *bonum commune* di era kepemimpinan kontemporer. Peneliti secara metodologis menggunakan studi kepustakaan sebagai strategi utama. Pendekatan ini menekankan pada penelusuran dan interpretasi mendalam terhadap berbagai sumber tertulis, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel teologis, dokumen Gereja, dan tulisan-tulisan kontemporer tentang kepemimpinan spiritual dan *bonum commune*. Prosedurnya mencakup pengumpulan, pencatatan, pengorganisasian, dan analisis teks secara sistematis untuk menyusun kerangka teoritis yang solid dan relevan dengan isu penelitian (Creswell & Creswell, 2021).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemikiran Thomas Aquinas: *Bonum Commune* dan Spiritualitas Kepemimpinan

Menurut Thomas Aquinas, *bonum commune* merupakan objek utama dari keadilan umum (*legal justice*) (Fatimah et al., 2025). Ia menegaskan bahwa keadilan berfungsi sebagai dorongan moral untuk menegakkan kesejahteraan komunitas, bukan sekadar *bonum privatum*. Dalam kerangka ini, seorang pemimpin yang benar-benar adil adalah mereka yang memprioritaskan kepentingan kolektif, menghindari orientasi dominasi atau ambisi personal yang justru merusak keseimbangan sosial. Aquinas juga menekankan bahwa hubungan individu dengan komunitas digambarkan melalui analogi *pars* dan *totus* (Arum, 2019). Kebaikan personal hanya bermakna jika lahir dari kebaikan umum; tanpa *bonum commune*, kebaikan pribadi tidak berdiri sendiri.

Implikasi dari pemikiran ini menunjukkan bahwa kepemimpinan rohani harus berorientasi pada pelayanan. Dalam hal ini seorang pemimpin tidak hanya mengarahkan, melainkan juga memperkokoh integritas moral guna mendukung kesejahteraan

kolektif. Thomas Aquinas membedakan dua jenis keadilan, yakni distributif dan komutatif dengan keadilan distributif memiliki peran sentral dalam pelayanan komunitas (Patimah et al., 2024). Keadilan distributif memperhatikan pembagian secara proporsional berdasarkan kontribusi maupun kebutuhan setiap individu dalam struktur sosial. Hal ini menunjukkan bahwa pemimpin harus adil dalam merespons kebutuhan dan peran individu agar solidaritas bersama terjaga, serta pelayanan menjadi nyata dan bermakna.

Aquinas menyatakan pula bahwa hukum dan tindakan pemerintah harus diarahkan demi *bonum commune*, bukan demi kekuatan penguasa (Sumaryono, 2002). Pemerintah atau pemimpin yang menyimpang ke arah ambisi pribadi dianggap tidak adil dan menyimpang dari tujuan moral pemerintahan. Pandangan ini mengandung dimensi spiritual *bonum commune* dan pada akhirnya berakar pada kebahagiaan sejati dalam Allah (*beatitudo*) sebagai tujuan akhir manusia. Oleh karena itu, kepemimpinan yang berdasarkan spiritualitas tidak hanya berhenti pada tataran etika sosial, melainkan melainkan sebagai jalan partisipasi dalam karya keselamatan Allah. Hal ini menunjukkan bahwa kepemimpinan bukan menjadi bentuk dominasi, melainkan bentuk dari manifestasi dedikasi terhadap keadilan, pelayanan, dan kesejahteraan bersama sebagai wujud nyata dari iman yang hidup.

Ajaran Gereja Tentang Bonum Commune

Ajaran Gereja Katolik *Gaudium et Spes* art. 74 menegaskan bahwa setiap komunitas sosial, mulai dari keluarga hingga negara harus diarahkan pada *bonum commune* (V. Paulus, 1965), yaitu kondisi sosial yang memungkinkan individu maupun kelompok mencapai pemenuhan hidup secara persis dan menyeluruh. *Gaudium et Spes* art. 75 lebih menekankan pada hubungan Gereja dengan dunia modern yang terlibat dalam usaha perjuangan sosial politik sebagai suatu usaha untuk mewujudkan *bonum commune* atau kesejahteraan umum. Umat Katolik memiliki peran khusus untuk ikut serta berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan sosial demi kebaikan bersama, sebagai bagian dari panggilan dan misi apostolik (V. Paulus, 1965).

Katekismus Gereja Katolik (KGK) 1907-1909, menyebutkan bahwa *bonum commune* mencakup tiga elemen utama yaitu, penghormatan terhadap hak dasar pribadi, kesejahteraan dan perkembangan sosial, serta perdamaian sebagai tatanan yang adil (Paulus II, 1992). Ketiga elemen ini bukan hanya representasi norma, tetapi juga mencerminkan panggilan moral bagi setiap otoritas dan komunitas untuk bekerja demi kepentingan kolektif menjamin bahwa individu maupun kelompok diperlakukan dengan hormat, kenyamanan hidup terwujud, dan stabilitas sosial dipelihara. Prinsip ini mendasari panggilan moral setiap otoritas dan komunitas untuk bekerja demi kepentingan bersama.

Kompendium Ajaran Sosial Gereja (ASG) pada bagian pendahuluan nomor 9, menyebutkan bahwa umat dipanggil untuk membangun humanisme yang menekankan solidaritas, kasih, dan keadilan. Solidaritas tersebut menjadi pijakan dalam pembentukan struktur sosial baru yang meletakkan martabat manusia sebagai dasar dan menjamin persatuan untuk perdamaian (Komisi Kepausan untuk Keadilan dan Perdamaian, 2004). Dokumen ini menegaskan bahwa *bonum commune* bukanlah tujuan individualistik, melainkan suatu kondisi di mana nilai-nilai Kristiani terkandung dalam struktur moral dan sosial demi kemajuan bersama.

Paus Paulus VI dalam *Mater et Magistra* no. 46 mengajak agar kemajuan sosial tidak semata-mata dikaitkan dengan aspek ekonomi, melainkan diarahkan demi kesejahteraan komunitas secara menyeluruh, berlandaskan solidaritas dan tanggung jawab kolektif. Dokumen ini kemudian didukung dengan Ensiklik *Mater et Magistra* no. 53 tahun 1961 oleh Paus Yohanes XXIII yang menekankan hubungan kemajuan sosial dan ekonomi dengan negara-negara maju dan negara berkembang. Ensiklik ini tidak sepenuhnya menampilkan istilah *bonum commune* secara dominan, namun dokumen ini menjadi panduan moral bagi umat Katolik dalam menghadapi permasalahan sosial dan ekonomi melalui penekanan terhadap pentingnya pengaktualisasian prinsip-prinsip keadilan, penghargaan terhadap martabat manusia, dan sikap solidaritas yang menjadi dasar dari konsep *bonum commune* (Yohanes, 1961).

Pesan ini sangat sejalan dengan Ajaran Sosial Gereja bahwa pembangunan sejati harus inklusif dan memperhatikan martabat setiap individu tertuang dalam *Mater et Magistra* no. 65 (Yohanes, 1961). Pada sisi lain, *Gaudium et Spes* no. 26 mempertegas makna *bonum commune* menjadi suatu pilar utama yang secara menyeluruh mengintegrasikan aspek kehidupan ekonomi dan sosial, sehingga kebaikan bersama dimaknai secara mendalam sebagai keseluruhan kondisi hidup kemasyarakatan yang memberi ruang bagi kelompok-kelompok dan anggota perorangan secara utuh mencapai kesempurnaannya sendiri (V. Paulus, 1965). Dengan demikian, pembangunan komunitas menjadi bentuk aktualisasi *bonum commune* dalam ranah yang lebih konkret.

Paus Fransiskus dalam *Fratelli Tutti* no. 111 dengan eksplisit menguraikan bentuk *bonum commune* dalam konteks persahabatan dan persaudaraan sosial, yang di dalamnya seorang individualisme tidak akan mampu membangun *bonum commune* sehingga kebaikan bersama hanya dapat diwujudkan melalui sikap solidaritas dan kerja sama antar manusia agar kepentingan pribadi dan nasional dilampaui untuk sampai pada titik dunia yang adil dan damai (Fransiskus, 2020).

Paus Yohanes Paulus II melalui Ensiklik *Sollicitudo Rei Socialis* bab IV no 27-30 menegaskan

bahwa pengembangan manusia tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan material, melainkan juga mencakup dimensi moral dan spiritual, terutama bagi mereka yang terdampak ketertinggalan. Pesan ini memperluas pemahaman *bonum commune* menjadi panggilan untuk memperhatikan keseluruhan dimensi manusia, termasuk martabat, solidaritas, dan keadilan bagi mereka yang termarginalkan (Paus Yohanes Paulus II, 1987). Oleh karena itu, kepemimpinan spiritual yang melayani tidak hanya memenuhi kebutuhan fisik, namun juga memupuk kesejahteraan holistik.

Pernyataan tersebut didukung Ensiklik *Rerum Novarum* no. 19 tahun 1891 oleh Paus Leo XIII yang secara spesifik membahas keadaan buruh beserta hak-hak manusia dalam kehidupan sosial ekonomi. Secara implisit disuarakan untuk sampai pada kebaikan bersama dengan menuntut keadilan bagi kaum miskin dan buruh, sekaligus penolakan terhadap eksploitasi yang merusak tatanan kehidupan masyarakat. Pada sisi lain, *Rerum Novarum* no. 34 melalui Gereja bersama Yesus Kristus sebagai Guru dan Pemimpin tidak hanya menekankan sikap yang adil, melainkan juga tindakan yang patuh pada pedoman yang lebih sempurna sehingga kelas-kelas yang ada saling bersatu dalam persaudaraan dan persahabatan yang didasari oleh cinta kasih (Leo, 1891).

Sintesis Dan Implikasi: Pemikiran Aquinas Dan Dokumen Gereja

Integrasi pemikiran Thomas Aquinas dan doktrin sosial Gereja menghasilkan kerangka konseptual yang kuat untuk memahami *bonum commune* sebagai konsepsi yang tak hanya teologis tetapi juga sangat praktis dalam konteks kepemimpinan. Aquinas menekankan bahwa hukum yang sah adalah *ordinatio rationis pro bono communi* (aturan akal demi *bonum commune*), aturan akal yang diarahkan bagi kebaikan bersama, diterbitkan oleh otoritas yang memang bertanggung jawab atas masyarakat dan diumumkan secara benar (Velez-Saenz, 1951). Dokumen Gereja, seperti Kompendium ASG, memperkaya bagian ini dengan menegaskan bahwa setiap komunitas, dari keluarga hingga negara, memiliki kewajiban moral untuk merumuskan struktur sosial yang memperkuat solidaritas, keadilan, dan martabat manusia (Komisi Kepausan untuk Keadilan dan Perdamaian, 2004).

Sintesis antara pandangan Aquinas dan ajaran Gereja menegaskan dimensi integral dari *bonum commune*. Aquinas melihat kedamaian (*peace*) sebagai hasil dari tatanan moral dan keharmonisan antar individu yang digerakkan oleh keadilan dan kasih, sementara Gereja menempatkan pelayanan terhadap kebaikan bersama sebagai tanggung jawab kolektif yang menembus batas historis dan nasional (Fatimah et al., 2025). Kepemimpinan spiritual, dalam perspektif ini, tidak hanya sekadar menjalankan struktur, melainkan juga menumbuhkan

harmoni internal dan eksternal yang memungkinkan kebaikan bersama mencapai puncaknya.

ASG mengadaptasi prinsip *universal destination of goods*, yang mengutarakan bahwa semua ciptaan dimaksudkan bagi seluruh umat manusia dan bukan untuk diprivatisasi secara eksklusif (Bailey, 2023). Ketika dipadukan dengan pandangan Aquinas mengenai kepemilikan yang sah, syarat moral menyatakan bahwa hak individu terhadap kekayaan bersifat terbatas dan harus sejajar dengan kebutuhan orang miskin (Gonzalo & Megger, 2025). Dalam praktik, seorang pemimpin spiritual harus mengambil keputusan yang mencerminkan distribusi sumber daya dengan adil berdasarkan kebutuhan dan martabat orang lain bukan berdasarkan kepentingannya sendiri.

Spiritualitas kepemimpinan sebagai pelayanan berarti memperhatikan kebutuhan materi dan diri umat secara menyeluruh, sejalan dengan prinsip *dignity of the person*, *bonum commune*, dan *integral human development* yang digarisbawahi dalam ajaran Gereja kontemporer (Monaci, 2025). Di dalam organisasi ataupun komunitas pemimpin, penghormatan terhadap integritas setiap individu menjadi praktis jika sumber daya, otoritas, dan kebijakan ditempatkan sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan kolektif bukan alat kekuasaan atau dominasi.

Aplikasi konkret dari sintesis ini menuntun pemimpin untuk memperkuat sistem yang menghormati hukum alam (*natural law*), prinsip subsidiaritas, solidaritas, serta pelayanan tanpa pamrih. Strategi kepemimpinan yang berakar pada *bonum commune* akan menjangkau melalui kebijakan yang inklusif, dukungan terhadap kelompok rentan, dan komitmen untuk membangun komunitas yang adil dan manusiawi. Secara teoretis maupun praktis, sinergi antara warisan Aquinas dan doktrin sosial Gereja memperkuat kebutuhan akan kepemimpinan yang melayani bukan menguasai.

Analisis Kasus

Dalam Misa pelantikan Pengurus Nasional PUKAT (Profesional Usahawan Katolik) periode 2025–2028 di Gedung KWI Jakarta pada 3 Juni 2025, Mgr. Antonius Subianto, OSC selaku Ketua KWI mengajak para profesional dan pengusaha Katolik untuk tidak semata menjalankan profesi, melainkan menjadi “*beacons of hope and compassion*” yaitu, penyinar harapan dan belas kasih dalam dunia usaha (Hariyadi, 2025). Ia menekankan pentingnya menyelaraskan spiritualitas Kristen dengan praktik profesional, sehingga iman menjadi nyata melalui tindakan yang menghormati, membangun, dan menyembuhkan. Pesan ini tidak hanya retorik, tetapi diarahkan untuk menghidupi nilai-nilai pelayanan dalam keseharian profesional Katolik.

Pesan ini diperkuat oleh Fr. Adrian Adirejo OP, selaku penasihat teologis PUKAT, yang menegaskan bahwa pelayanan sejati terdiri dari doa

dan refleksi, bukan sekadar aktivitas lahiriah. Ujungnya, ia menyampaikan pesan mendalam: “*Service without prayer is hollow. Prayer without action is incomplete.*” Dalam konteks ini, pemimpin rohani dan pelaku profesional Katolik dipanggil untuk menjadi agen kasih Kristiani yang nyata, mencerminkan Kerajaan Allah melalui kerja, kolaborasi, dan solidaritas konkret dalam masyarakat.

Mgr. Antonius Subianto juga memperkenalkan konsep spiritual Jawa “*nang-ning-nung*” yang berarti diam, tenang, dan renung sebagai praktik spiritual penting bagi para profesional. Melalui ketenangan dan refleksi mendalam, mereka diharapkan mampu membuka hati terhadap tuntunan Roh Kudus dan menampilkan keselarasan antara iman, intelektualitas, dan pelayanan. Konsep inilah yang membantu menjaga keseimbangan spiritual agar pengabdian lahiriah memang berakar kuat dalam sikap rohaniannya.

Dampak ajakan ini tampak nyata. Banyak anggota PUKAT kini melihat profesi sebagai panggilan pelayanan dan solidaritas, bukan sekadar pencapaian ekonomi. Komunitas PUKAT berkembang menjadi ruang rekoleksi yang memperkuat integritas rohani: kejujuran, belas kasih, dan kerendahan hati menjadi prinsip dasar kolaborasi profesional. Hal ini mencerminkan realisasi spiritualitas kepemimpinan sebagai pelayanan menuju terwujudnya *bonum commune*.

Spiritualitas kepemimpinan sebagai pelayanan berarti memperhatikan kebutuhan materi dan spiritual umat secara utuh. Hal ini sejalan dengan prinsip *dignity of the person, common good*, dan *integral human development* sebagaimana ditegaskan dalam ajaran sosial Gereja kontemporer (Marek & Jablonski, 2021). Pemimpin profesional tidak hanya menghadirkan nilai material dalam organisasi, tetapi juga membentuk komunitas yang berkembang secara utuh, holistik, dan manusiawi. Pendekatan ini membuka ruang bagi integrasi iman dan profesi dengan pelayanan nyata, menjadikan dunia usaha bukan arena dominasi, melainkan wahana pelayanan yang mewujudkan kebaikan bersama.

Secara teoretis, konsep ini selaras dengan warisan filosofis dan teologis Aquinas dan doktrin sosial Gereja. Aquinas menekankan bahwa kepemilikan dan struktur sosial harus diarahkan demi *bonum commune*, bukan ambisi pribadi (Gutschke, 2018). Sementara dokumen Gereja masa kini seperti Kompendium ASG dan *Sollicitudo Rei Socialis* menegaskan pentingnya pembangunan manusia yang integral yang tidak hanya fokus pada aspek material, namun juga dimensi moral, spiritual, dan inklusif terhadap yang termarjinalkan.

Analisis kasus PUKAT menunjukkan bahwa jika panggilan rohani dan integritas moral disinergikan dengan aksi konkret, maka spiritualitas kepemimpinan sebagai pelayanan mampu menjembatani teori dan praktik. Para pemimpin usahawan Katolik yang menghidupi doa dan refleksi

(*nang-ning-nung*), pelayanan nyata, dan komunitas inklusif telah menegaskan bahwa *bonum commune* bukan sekadar ide teologis, tetapi akan terealisasi melalui hubungan dan aksi yang membawa harapan, keadilan, dan kesejahteraan holistik bagi banyak orang.

Refleksi Teologis

Kasus nyata dari PUKAT Nasional yang diawali dengan pesan Mgr. Antonius Subianto untuk menjadi *beacons of hope and compassion* dalam dunia usaha membuka pandangan teologis yang mendalam tentang spiritualitas kepemimpinan sebagai pelayanan. Seruan tersebut tidak hanya menjadi ajakan moral, melainkan sebuah undangan untuk merefleksikan iman secara konkret dalam ranah profesional.

Teologi pelayanan atau diakonia menegaskan bahwa iman sejati tidak berhenti pada keyakinan batin, tetapi diwujudkan melalui tindakan nyata yang menghadirkan kasih, keadilan, dan solidaritas (Nissen, 2023). Hal ini sejalan dengan pesan Fr. Adrian Adirejo OP yang menekankan bahwa pelayanan sejati selalu berpijak pada doa dan aksi, sebab doa tanpa tindakan menjadi hampa, sedangkan tindakan tanpa doa kehilangan roh yang menghidupkannya.

Doa dan tindakan merupakan dua sisi yang tidak terpisahkan dalam membangun komunitas yang manusiawi dan adil (Youvan, 2024). Selain itu, konsep spiritual Jawa “*nang-ning-nung*” yaitu, diam, tenang, dan reflektif menjadi landasan penting bagi para profesional untuk tetap terbuka terhadap bimbingan Roh Kudus. Konsep ini bukan sekadar praktik budaya, melainkan wujud nyata dari *imitatio Christi*, yakni meneladani Kristus yang mengutamakan keheningan dan doa sebagai sumber kekuatan dalam karya kerasulan. Hal ini mengingatkan kembali pada prinsip *lectio divina*, di mana keheningan membuka jalan bagi hati untuk mendengarkan panggilan Tuhan di tengah aktivitas profesional.

Transformasi pandangan bahwa profesi adalah panggilan pelayanan kemudian diwujudkan dalam praksis dunia usaha. Anggota PUKAT menghidupi nilai teologis *bonum commune* dengan menjadikan profesi mereka sarana solidaritas, martabat manusia, dan kesejahteraan bersama. Paradigma ini sejalan dengan pemikiran Thomas Aquinas dan doktrin sosial Gereja yang menekankan integritas moral kepemimpinan. Dengan demikian, spiritualitas kepemimpinan sebagai pelayanan menemukan wujud nyatanya dalam keterpaduan iman, doa, refleksi, dan tindakan konkret demi terciptanya kebaikan bersama.

Meski memiliki niat untuk mewujudkan *bonum commune* merupakan prasyarat penting, hal itu tidaklah mencukupi. Seorang pemimpin harus memiliki kerendahan hati untuk membuka diri terhadap suara rakyat, mendengarkan kebutuhan, keluhan, serta harapan mereka secara tulus. Agar mampu mendengarkan dengan penuh pemahaman,

pemimpin perlu menanggalkan segala prasangka dan ego, sehingga ia sungguh menghayati aspirasi masyarakat yang dipimpinnya. Dengan demikian, tindakan kepemimpinan yang dilandasi refleksi spiritual dan empati menjadi lebih tepat arah dan berdampak positif, menjadikan pelayanan yang diwujudkan benar-benar responsif, terarah, dan bermakna bagi kesejahteraan bersama.

4. KESIMPULAN

Artikel ini menegaskan bahwa spiritualitas kepemimpinan sebagai bentuk pelayanan merefleksikan sebuah paradigma yang melampaui dominasi dan ambisi pribadi demi *bonum commune*. Pemikiran St. Thomas Aquinas, khususnya relasi antara bagian (*pars*) dan keseluruhan (*totus*) dalam kerangka keadilan (*iustitia*), memperkuat gagasan bahwa kesejahteraan bersama hanya terwujud ketika individual memberi prioritas kepada komunitas secara menyeluruh. Doktrin sosial Gereja terkini menambahkan dimensi integral, yaitu bahwa kepemimpinan sebagai pelayanan harus inklusif, etis, dan berlandaskan spiritualitas komunitas. Kasus PUKAT Nasional menjadi ilustrasi nyata bagaimana panggilan spiritual dapat diaktualisasikan dalam dunia profesional: para pemimpin Katolik mengubah profesi menjadi ladang pelayanan (*servant leadership*), memperkuat solidaritas, mempraktikkan keheningan reflektif (*nang-ning-nung*), dan menyelaraskan iman dengan tindakan konstruktif untuk mencapai kesejahteraan bersama. Artinya, kepemimpinan pelayanan bukan hanya model ideal tetapi menjadi kebutuhan mendesak dalam membentuk masyarakat inklusif dan adil, yang melayani bukan menguasai.

5. REFERENSI

- Arum, G. A. (2019). Konsep Keadilan (Iustitia) Perspektif St. Thomas Aquinas dan Relevansinya Bagi Pemaknaan Sila V Pancasila. *Lumen Veritatis: Jurnal Filsafat Dan Teologi*, 10(1), 23–44.
- Bailey, J. (2023). Land, Private Property, and the Universal Destination of Goods: A Catholic Perspective on Economic Inequality in Latin America. *Religion and Development*, 2(1), 84–102.
- Benawa, A. (2014). Dimensi Spiritual Dalam Kepemimpinan. *Humaniora*, 5(2), 872–880.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2021). *Research design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. SAGE Publications, Inc.
- Donggo, W. J., & Anggal, N. (2019). Motivasi dan Bentuk-Bentuk Partisipasi Umat Katolik dalam Mewujudkan Bonum Commune. *Gaudium Vestrum: Jurnal Kateketik Pastoral*, 50–62.
- Fatimah, M. S., Velliyanti, J., Nuraeni, Z., & Yusniar, R. (2025). Keadilan Dalam

Perspektif Filsafat Hukum Thomas Aquinas. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 3(02).

- Fransiskus. (2020). Fratelli Tutti (Saudara Sekalian). *Ensiklik Paus Fransiskus Tentang Persaudaraan Dan Persahabatan Sosial*, 271, 5–180.
- Gonzalo, M. B., & Megger, D. (2025). The Common Good and the Market Economy. *Journal of the Sociology and Theory of Religion*, 17(1), 40–62.
- Gutschke, D. (2018). *The Relationship between Justice and the Common Good according to St. Thomas Aquinas*. Catholic University of America. 2018.
- Hariyadi, M. (2025). *Pengurus Nasional PUKAT (Profesional Usahawan Katolik) periode 2025–2028 di Gedung KWI Jakarta pada 3 Juni 2025*. Sesawi.net.
- Komisi Kepausan untuk Keadilan dan Perdamaian. (2004). *Kompendium Ajaran Sosial Gereja. The Holy See*, 1–560. https://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/justpeace/documents/kompendium_text_id.pdf
- Leo, X. (1891). *Rerum Novarum (Hal-Hal Baru). Integration in Rome and in the Roman World*, 42, 13.
- Marek, A., & Jablonski, A. (2021). Care of the Common Good as a Responsibility of Business Leaders. *Catholic Social Teaching Perspective. Religions*, 12(2), 125.
- Monaci, M. (2025). In Search of Sustainable Leadership Paradigms: Insights from Catholic Social Thought. *Leadership Studies in the Turbulent Business Ecosystem*, 123.
- Muti, K. A., & Senda, S. S. (2021). Pemimpin Yang Adil Perspektif Kitab Amsal. *Pastoralia*, 2(1), 31–37.
- Nissen, J. (2023). Partnership Spirituality as the Mutuality of Giving and Receiving: Reflections on Pastoral Care and Diaconia. *Diaconia*, 14(1), 7–34.
- Ortiz Gomez, M., Ariza Montes, A., & Molina-Sanchez, H. (2020). Servant leadership in a social religious organization: An analysis of work engagement, authenticity, and spirituality at work. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 17(22), 8542.
- Patimah, D. S., Marbun, E. T., Rahman, Z. O., & Pratama, M. A. (2024). Virtue of Justice Thomas Aquinas. *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, 1(02).
- Paulus, B. I. (2012). Bonum Commune Sebagai Medan Perjuangan Communio. *Jurnal Teologi*, 1(1), 27–38. <https://doi.org/10.24071/jt.v1i1.412>

- Paulus II, Y. (1992). Katekismus Gereja Katolik (Catechism of the Catholic Church). *The Church and Other Faiths*, 273.
- Paulus, V. (1965). Gaudium et Spes (Konstitusi Pastoral tentang Tugas Gereja dalam Dunia Dewasa Ini). *Dokpen KWI*, 19.
- Paus Yohanes Paulus II. (1987). Keprihatinan Akan Masalah Sosial. *Seri Dokumen Gerejawi No. 3*, 53(9), 1689–1699.
- Sumaryono, E. (2002). *Etika dan hukum: Relevansi teori hukum kodrat Thomas Aquinas*. PT Kanisius.
- Velez-Saenz, J. (1951). *The doctrine of the common good of civil society in the works of St. Thomas Aquinas*. Department of Philosophy [University of Notre Dame].
- Yohanes, X. (1961). *Seri Dokumen Gerejawi No. 36: Mater et Magistra*. 36, 84.
- Youvan, D. C. (2024). *Balancing Prayer and Action: A Biblical Framework for Faithful Living*. August. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.29662.65604>